

## 12 Wilayah Polda Jadi Prioritas Pertama karena Dianggap Rawan pada Pemilu 2024

JAKARTA (IM) – Mabes Polri menyebut ada 12 wilayah hukum kepolisian daerah (polda) yang menjadi prioritas pertama lantaran dinilai sangat rawan selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Kabag Anev Robinops Sops Polri, Kombes Muhammad Firman mengatakan, penentuan wilayah prioritas ini dilakukan Polri berdasarkan tingkat kerawanan gangguan pada Pemilu 2024.

“Yang mana ada 12 polda merupakan prioritas pertama, prioritas pertama merupakan prioritas yang sangat rawan,” kata Firman dalam Dialog Publik dengan tema “Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju” di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (11/10).

Adapun 12 polda yang masuk kategori prioritas satu adalah wilayah hukum Polda Jawa Timur (Jatim), Aceh, Sulawesi Tenggara (Sultra), Maluku, Kalimantan Barat (Kalbar), Bali, Jawa Tengah (Jateng), Metro Jaya, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua.

Sementara itu, Firman menyebut ada 22 wilayah polda lainnya masuk kategori prioritas dua. “Ada 22 polda masuk prioritas dua merupakan polda yang rawan,” ujarnya.

Dalam rangka mengamankan Pemilu Serentak 2024, Polri menggelar Operasi Mantap Brata. Dalam operasi itu akan diturunkan sebanyak 434.197 personel dari tingkat Mabes Polri maupun polda untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024.

Tujuan operasi untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Operasi ini juga akan resmi bekerja mulai 17 Oktober 2023, dengan dipimpin oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran.

“Operasi mantap brata digelar di 34 polda yang dibagi kepada prioritas satu dan prioritas dua,” kata Firman.

Sebagaimana diberitakan, Pemilu 2024 bakal digelar pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). • lus

FOTO: ANTARA



### POLDA METRO JAYA MUSNAHKAN BARANG BUKTI NARKOBA

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (tengah), Kepala Kantor Beacukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo (kedua kiri), anggota Dewan Pakar DPP GRANAT Irjen Pol (Purn) Anjan Pramuka Putra (kedua kanan), Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto (kanan), dan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki (kiri) menunjukkan barang bukti saat pemusnahan barang bukti narkoba di Polda Metro Jaya (PMJ), Rabu (11/10). Polda Metro Jaya memusnahkan 200,67 kilogram ganja, 279,44 kilogram sabu, dan 60.800 butir ekstasi yang merupakan hasil dari pengungkapan Ditresnarkoba PMJ bersama Polres jajaran.

## Kapolda Metro Pastikan Usut Tuntas Dugaan Pemerasan Terhadap SYL oleh Pimpinan KPK

Karyoto mengatakan, Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengungkapkan bahwa Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, akan diperiksa oleh penyidik terkait kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Karyoto menyebutkan ia tidak bisa memastikan apakah Irwan Anwar bakal hadir dalam pemeriksaan tersebut. “Kalau tidak salah hari ini panggilannya. Untuk hadir atau tidak nanti sama-sama kita lihat,” kata Karyoto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/10).

Karyoto mengatakan, Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas dalam perkara dugaan pemerasan terhadap politikus NasDem itu.

Menurutnya, pengusutan kasus secara umum akan dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga proses klarifikasi. Nantinya, kata dia, jika unsur-unsur pidana

terpenuhi, kepolisian akan melakukan gelar perkara.

“Laporan masuk, ya diproses, diselidiki, cari alat buktinya, diklarifikasi. Kalau ada apa-apa, gelar perkara,” tuturnya.

“Ya kalau perkara sudah masuk, ya akan kami selesaikan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penanganan dugaan kasus pemerasan berkaitan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

“Dari hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan,” kata dia, Sabtu (7/10).

Selain itu, dalam kasus ini mantan Menteri Pertanian yang juga politikus Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo

juga telah tiga kali dilakukan pemeriksaan.

“Termasuk salah satunya Menteri Pertanian RI. Di mana beliau telah dimintai keterangan untuk klarifikasi sebanyak tiga kali. Hari ini yang ketiga kalinya beliau dimintai klarifikasi,” kata Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (5/10).

#### Soal Penggeledahan

Sebelumnya beredar berita bahwa rumah pimpinan KPK, Firdi Bahuri, digeledah. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap SYL.

“Begini, terkait penyidikan itu kan banyak hal yang dinamakan upaya paksa. Mana yang perlu, mana yang diinginkan, kita harus lengkapi administrasinya, baru kita laksanakan. Masih dalam proses,” kata Karyoto kepada wartawan.

Hingga saat ini pihaknya masih mendalami perkara tersebut. Penyidik masih melakukan proses sejak kasus dugaan pemerasan itu naik ke tahap penyidikan.

“Ada hal yang sifatnya, penyidikan itu semacam sistem ada laporan masuk ya diproses, diselidiki dicari alat bukti diklarifikasi kalau ada

apa-apa gelar perkara, kan sudah dilaporkan, *engga* ada yang baru,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan sejumlah warga, tetangga rumah pribadi Firdi, di Grand Galaxy, Kota Bekasi, tidak melihat ada petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Firdi. “Tidak benar. Hingga saat

ini tidak ada penggeledahan di rumah Pak Firdi,” ujar Ketua RW setempat, Irwan Irawan, Selasa (10/10).

Irwan mengesakan bahwa rumah pribadi Firdi tetap berlangsung normal meski beredarnya informasi adanya tindakan penggeledahan tersebut. “Iya, tidak ada (penggeledahan),” katanya. • lus

### Bareskrim Sita Uang Rp 922 Juta dan 11 Mobil Tersangka Korupsi Gerobak UMKM di Kemendag

JAKARTA (IM) – Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kemendag, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan gerobak UMKM periode 2018-2019.

Penyitaan dilakukan penyidik usai menggeledah rumah dan kantor dari tersangka Putu Indra Wijaya (PIW) selaku Kabag Keuangan Seditjen PDN Kemendag.

“Penggeledahan terhadap rumah atau kantor diantaranya Kantor Kemendag RI di DKI Jakarta, Kantor PT Arjuna Putra Bangsa di Pontianak, dan Rumah Tersangka PIW di Jakarta Timur,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, Rabu (11/10).

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita uang tunai senilai Rp922 juta dari tangan tersangka. Selain itu sebanyak 11 sepeda motor dan 6 mobil atas nama PIW juga turut disita.

Penyitaan juga dilakukan pada dua lahan tanah masing-masing seluas meter persegi dan 45 meter persegi. Kemudian satu unit tanah dan bangunan berupa Ruko atas nama tersangka PIW.

“Sebidang tanah dan bangunan berupa Rumah dengan kepemilikan DH (Istri Tersangka), Peralatan Bengkel milik tersangka PIW, serta Dokumen lelang, dokumen kontrak, dokumen Pembayaran,” tuturnya.

Penggeledahan juga dilakukan penyidik terhadap rumah dan kantor tersangka Bunaya Priambudhi (BP) selaku Kasubag TU DJPDN Kemendag. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita uang tunai sebesar Rp240 juta, uang asing senilai 30.000 USD, serta sejumlah dokumen lelang, kontrak dan pembayaran.

“Selanjutnya menyita Gerobak Tipe 1 (Gerobak Souvernir) sebanyak 64 unit dan Gerobak tipe 2 (Gerobak Bakso) sebanyak 52 Unit,”

ujar Ramadhan.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan saat ini Bareskrim Polri masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait mulai dari BPK, LKIP hingga PPAATK untuk mengusut aliran dana dari kedua tersangka.

“Rencana tindak lanjut yaitu melaksanakan tahap 2 (dua) perkara dengan PJU,” ucap Ramadhan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri membeberkan peran dua PPK dari Kemendag yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan gerobak UMKM periode 2018-2019.

Dir Tipidkor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan mereka yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan Putu Indra Wijaya (PIW) selaku Kabag Keuangan Seditjen PDN Kemendag, dan Bunaya Priambudhi (BP) selaku Kasubag TU DJPDN Kemendag.

Tersangka Putu maupun Bunaya terbukti menjalankan proyek pengadaan gerobak bantuan UMKM secara fiktif masing-masing untuk tahun anggaran 2018 dan tahun 2019.

“Untuk yang tersangka pertama itu di tahun 2018 adalah saudara PIW (Putu Indra Wijaya), jadi selaku PPK di tahun anggaran 2018,” tuturnya, Rabu (7/9).

Sebelum lelang pengadaan proyek gerobak dagang, Putu sempat melakukan kesepakatan dengan perusahaan penyedia barang dan jasa PT. PDM milik BW dan M.

Dalam pertemuan itu, Putu juga meminta uang sebesar Rp800 juta terhadap keduanya dengan jaminan akan diberikan pekerjaan pembuatan gerobak dagang Kemendag. Cahyono mengatakan sampai akhir Desember 2019, tercatat baru sebanyak 2.500 unit gerobak yang selesai dikerjakan dari total proyek 7.200 gerobak dagang. “Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka PIW selaku PPK, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp30 M,” katanya. • lus

FOTO: ANTARA



PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN DI SUMUT Pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/10). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar pemutihan pajak atau penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dilaksanakan dari 29 Mei sampai 31 Oktober

### Kontras Desak Kapolri Copot Kapolda Kalteng Buntut Konflik Polisi Vs Warga di Seruyan

JAKARTA (IM) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Nanang Aviatio.

Desakan pencopotan buntut bentrokan warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan dengan aparat kepolisian yang menewaskan seorang warga pada Sabtu (7/10).

Tidak hanya Kapolda, Kontras juga mendesak agar Kapolres Seruyan turut dicopot dari jabatannya.

“Kapolri segera mengusut seluruh aparat kepolisian pelaku kekerasan dan penembakan yang mengakibatkan adanya korban jiwa serta luka-luka secara profesional, transparan dan akuntabel dan menindak tegas dengan mencopot Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolres Seruyan karena gagal dalam menangani massa aksi hingga menimbulkan korban jiwa,” ujar Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10).

Selain itu, Kapolri juga didesak untuk menarik semua aparat keamanan dari lokasi konflik agraria di Desa Bangkal untuk memberikan rasa aman dan kondusifitas di lokasi. Kontras juga meminta Kapolri agar melakukan evaluasi menempuh mekanisme peradilan umum kepada aparat kepolisian yang diketahui menggunakan kekuatan berlebihan sehingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia.

“Mengingat tindakan yang dilakukan nyata merupakan tindak pidana guna memberikan efek jera dan mencegah berulangnya peristiwa ini di masa yang akan datang,” kata Dimas.

Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Negara (BPN) juga didesak agar melakukan evaluasi dan mencabut perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada yang menjadi penyebab konflik agraria dengan masyarakat.

“(Juga) mendesak Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk segera melakukan investigasi mendalam atas peristiwa ini dengan melakukan pendalaman konstruksi peristiwa, meninjau langsung di tempat kejadian dan memeriksa anggota Polres Seruyan yang diduga melakukan penembakan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, seorang warga tewas diduga tertembak dan satu lainnya mengalami luka berat dalam bentrok antara warga Bangkal dan polisi di perusahaan perkebunan sawit, PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023.

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji membenarkan bahwa telah terjadi bentrok antara warga dan polisi di lokasi perkebunan sawit tersebut. Erlan mengungkapkan, bentrok pecah pada Sabtu siang sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, polisi sedang melakukan pengamanan konflik di lahan perkebunan milik PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1.

Menurut versi polisi, sejumlah warga mengadang aparat sambil membawa ketapel dan tombak.

“Sehingga terpaksa diamankan, namun warga tidak terima sehingga warga melakukan perlawanan dan menyerang petugas,” kata Erlan kepada Kompas.com pada 10 Oktober 2023. • lus